

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG RUSAK DI DAERAH KABUPATEN SOLOK KECAMTAN HILIRAN GUMANTI

Nengsi Gusrienti¹, Rika Widianita²

nengsigusrienti@gmail.com¹, rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id²

UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meskipun terdapat kendala seperti ketergantungan dana dari pemerintahan pusat yang sering menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah. Dinas Pekerjaan Umum diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperlancar pembangunan infrastruktur jalan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Insfrastruktur Jalan.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan elemen penting dalam sistem prasarana transportasi yang berfungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan penggerak perekonomian. Peranannya sangat krusial dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung aspek ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai keseimbangan serta pemerataan pembangunan antar daerah. Masyarakat sebagai pengguna fasilitas pemerintah perlu berpartisipasi aktif dalam pembangunan fasilitas umum, termasuk perbaikan jalan yang rusak akibat bencana alam seperti banjir. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi jalan, karena kerusakan dapat membahayakan pengguna dan sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini berkaitan dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, di mana jalan yang tidak layak atau rusak, berlubang, dan tidak segera diperbaiki menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat. Jalan yang berlubang dapat menjadi lebih berbahaya saat hujan, ketika genangan udara menutupi lubang tersebut dan tidak terlihat oleh pengguna, terutama pengendara sepeda motor yang sering menjadi korban kecelakaan. Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah terhadap perbaikan dan pemeliharaan jalan sangat diperlukan demi keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Kerusakan jalan mulai dirasakan oleh masyarakat berdasarkan informasi yang peneliti terima yaitu mulai dari pertengahan tahun 2018, kerusakan jalan di Daerah Kabupaten Solok yang disebabkan oleh berbagai macam faktor mulai dari bencana alam seperti longsor yang disebabkan oleh derasnya hujan yang mengguyur sehingga menyebabkan kerusakan jalan yang cukup parah, sehingga pengguna jalan kesusahan untuk melewati jalan yang rusak, seringkali pengemudi roda dua terjatuh saat melewati jalananyang rusak tersebut. selain itu arus lalu lintas juga menjadi terhambat karena rusaknya jalan, maupun dari pengguna jalan di kawasan Kecamatan Hiliran Gumanti seperti kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi ketentuan dari muatan, ditambah dengan kurangnya perhatian pemerintah Kabuten Solok untuk melakukan pembangunan jalan atau perbaikan jalan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh dengan fokus pada pengalaman, pandangan, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan masyarakat setempat dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek pembangunan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi langsung terhadap kondisi jalan yang rusak serta aktivitas pembangunan di lapangan. Observasi ini memungkinkan peneliti mencatat detail situasi fisik, tingkat kerusakan, dan proses pengerjaan jalan. Kedua, wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan berbagai pihak, termasuk pengguna jalan, tokoh masyarakat, dan pejabat terkait. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait peran pemerintah dalam pembangunan jalan. Ketiga, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan informasi yang resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, penelitian ini mengungkapkan bahwa kepala daerah memiliki peran ganda sebagai perwakilan daerah dan sebagai alat pemerintahan pusat. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan daerah, kepala daerah bertugas menjalankan hak, kewenangan, dan kewajiban pemerintahan daerah, mewakili daerah di pengadilan, serta bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun anggaran pendapatan daerah dan peraturan daerah. Sebagai alat pemerintahan pusat, kepala daerah bertanggung jawab dalam menjaga wilayah sesuai kebijakan pemerintah, melaksanakan pembinaan persatuan bangsa, serta mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan daerah lain dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kesimpulannya, pemerintah desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan suatu iklim yang mendukung inisiatif dan swadaya masyarakat dalam perdesaan melalui komunikasi pembangunan dan pengarahannya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Solok, Kecamatan Hiliran Gumanti, yang dapat dinilai dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan.

Perencanaan adalah proses awal yang terstruktur dan sistematis untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah desa merancang rencana dengan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah. Proses ini bertujuan untuk menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan masukan dari warga. Perencanaan mencakup penentuan jenis pembangunan yang akan dilakukan, metode pelaksanaan, waktu pengerjaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Rencana tersebut tidak hanya berakhir setelah ditetapkan, tetapi harus diimplementasikan dengan konsistensi. Di Kecamatan Hiliran Gumanti, misalnya pemerintah desa mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk merancang pembangunan jalan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan memberikan nilai tambah, karena program pembangunan yang dirancang menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahap implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, material, dan waktu. Dalam praktiknya, pemerintah desa sering menghadapi

kendala dalam memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan standar yang telah ditetapkan. Di daerah Kabupaten Solok Kecamatan Hiliran Gumanti, misalnya, proses pembangunan jalan tidak terlaksana dengan optimal karena lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Para pekerja sering kali tidak fokus pada pekerjaan dan menghabiskan waktu dengan aktivitas yang tidak produktif, seperti berbincang atau istirahat berlebihan. Selain itu, pemerintah desa hanya melakukan kunjungan singkat ke lokasi pembangunan, yang menyebabkan kualitas pekerjaan menurun. Akibatnya, banyak proyek jalan yang tidak selesai tepat waktu atau memiliki kualitas yang rendah, sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditentukan. Pengawasan juga berfungsi untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran atau penyalahgunaan sumber daya. Di daerah Kabupaten Solok Kecamatan Hiliran Gumanti, pengawasan terhadap pembangunan jalan dilakukan secara terbatas dan tidak rutin. Akibatnya, beberapa jalan tetap dalam kondisi yang buruk meskipun telah melalui proses pembangunan. Misalnya, jalan yang masih berbatu, berlubang, atau tergenang air saat hujan karena pengerjaannya tidak diselesaikan dengan baik. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang menggunakan jalan untuk aktivitas sehari-hari seperti pergi ke kebun atau pasar. Kurangnya pengawasan juga mengakibatkan hasil pembangunan tidak sesuai dengan harapan. Dalam beberapa kasus, jalan yang baru dibangun mudah rusak karena material yang digunakan tidak berkualitas atau proses pengerjaannya tidak dilakukan dengan benar. Pemerintah desa perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai standar, sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perubahan iklim tidak stabil dan kondisi jalan juga dapat menyebabkan kecelakaan. Namun, pengaruh tersebut tidak dapat ditentukan secara mutlak. Pengemudi dan pejalan kaki merupakan faktor utama dalam peristiwa kecelakaan. Situasi lingkungan, seperti perubahan iklim yang ekstrem dan kondisi jalan, sangat berpengaruh.

1. Jalan berlubang menciptakan cekungan di permukaan jalan yang lurus, di mana cekungan tersebut memiliki diameter dan kondisi yang berbeda dari jalan di sekitarnya. Jalan yang rusak sangat berbahaya bagi pengguna jalan, terutama bagi kendaraan beroda. Jalan rusak adalah jalan dengan permukaan yang tidak rata, bisa jadi jalan yang belum diaspal atau jalan yang sudah diaspal namun mengalami peretakan. Umumnya, jalan bobrok tidak ditemukan di jalan arteri, tetapi lebih sering terjadi di jalan lokal. Jalan licin dapat disebabkan oleh terkumpulnya udara akibat hujan atau tumpahan minyak, serta penggunaan pewarna atau permukaan dari besi atau rel kereta. Situasi ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, karena keseimbangan kendaraan akan terganggu pada saat melewati jalan licin atau saat menikung. Jalan menikung adalah jalan yang membentuk sudut dengan kemiringan kurang dari 180 derajat. Ketika melewati jalan menikung, diperlukan strategi khusus, konsentrasi, dan kewaspadaan karena dapat menyebabkan hilangnya kendali pada kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan.
2. Perlengkapan jalan sangat penting bagi pengguna jalan karena berfungsi sebagai panduan dan merupakan komitmen masyarakat bahwa setiap perlengkapan memiliki arti dan fungsi tersendiri. Komitmen ini sejalan dengan tuntutan sosial di mana perlengkapan tersebut digunakan sebagai alat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur lalu lintas agar berfungsi dengan baik.
3. Cuaca juga menjadi faktor penyebab kecelakaan, hujan deras, angin topan beliung, kabut, hingga cuaca kering yang menyebabkan debu di jalan dapat meningkatkan risiko. Hujan

tidak hanya membatasi jarak pandang tetapi juga mengurangi daya cengkeram ban pada permukaan jalan. Terlebih lagi, jika kendaraan di depan atau belakang tidak memiliki kewaspadaan tinggi, hal ini dapat menyebabkan masalah serius.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Faktor penghambat yang dialami pemerintah daerah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yaitu:

1. Anggaran, Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Meski dana telah dialokasikan, pencairannya sering kali mengalami kendala sehingga memengaruhi jadwal pembangunan. Anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya disetujui atau cair sesuai dengan perencanaan, sehingga prioritas pembangunan harus dipilih dengan sangat selektif.
2. Lokasi, Lokasi pembangunan sering kali menjadi faktor penghambat, terutama jika medan yang dihadapi sulit atau kondisi lingkungan tidak mendukung. Sebagai salah satu daerah yang bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, Kabupaten Solok sering menghadapi tantangan dalam proses pencairan dana. Dana dari pusat, yang biasanya disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus melalui prosedur yang panjang dan birokrasi yang rumit sebelum dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Ketergantungan ini memperlambat proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berdampak langsung terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan.

Berikut ini merupakan Faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur yaitu:

1. Partisipasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan proyek infrastruktur jalan. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti Usulan Pembanguna Jadi Masyarakat memberikan masukan dan aspirasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Proses ini memungkinkan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga rencana pembangunan lebih relevan dengan kondisi lapangan. Kontribusi Fisik dan Material: Dalam beberapa kasus, masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga atau material untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Gotong royong juga menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan proyek jalan, pengawasan Secara Mandiri: Masyarakat turut mengawasi proses pembangunan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini membantu mencegah terjadinya penyelewengan atau pengerjaan yang tidak sesuai standar.

2. Jaringan informasi dan komunikasi

Jaringan informasi dan komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan pembangunan jalan. Komunikasi yang lancar memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Beberapa peran sistem informasi dan komunikasi dalam mendukung pembangunan yaitu Kolaborasi Internal dan Eksternal, Hubungan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga (seperti kontraktor) dapat terjalin dengan baik melalui komunikasi yang terstruktur, penyampaian Informasi yang cepat, dengan adanya teknologi komunikasi, informasi terkait rencana, kendala, dan progres pembangunan dapat dengan cepat disampaikan ke pihak-pihak terkait, sehingga meminimalkan hambatan yang mungkin terjadi dan meningkatkan efisiensi komunikasi yang baik membantu memastikan bahwa setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan

pembangunan berjalan sesuai rencana.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang infrastruktur sangat berperan dalam mendukung pembangunan jalan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, membutuhkan tenaga ahli yang mampu menjalankan tugasnya dengan profesional. Beberapa aspek yang mendukung dari segi SDM adalah Keahlian Teknis SDM yang terampil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan memastikan kualitas pekerjaan yang baik, Kemampuan Manajerial aparatur pemerintah dengan keterampilan manajemen yang baik dapat mengelola proyek dengan lebih efisien, mulai dari pengalokasian dana hingga pengawasan hasil pekerjaan. Pengembangan Kompetensi pemerintah sering kali mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM, baik untuk tenaga teknis maupun administratif, sehingga dapat mengantisipasi tantangan yang muncul selama proses pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan infrastruktur jalan. Namun, pelaksanaan pembangunan belum maksimal akibat kendala seperti keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada dana pusat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan. Selanjutnya yaitu, komunikasi dijalin dengan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta sumber daya manusia yang kompeten, turut membantu keberhasilan program. Meskipun terdapat hambatan seperti cuaca buruk dan lokasi pembangunan yang sulit diakses, upaya pemerintah untuk memotivasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas kerja tetap berjalan. Secara keseluruhan, pemerintah desa dan daerah berperan penting dalam menciptakan iklim yang mendukung pembangunan infrastruktur jalan, meskipun diperlukan perbaikan lebih lanjut dalam hal pengawasan dan alokasi anggaran agar pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Dani Hakim, Nopriza Hevina, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Kabupaten Lampung Utara, jurnal hokum POSITUM, Vol.7, No.2, Tahun 2022
- Ayu Cindy Iestari, Ummah Khairatul, Azmi Nurul Pratiwi, Dkk, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Tobu Kecamatan Batu Nanggar, Kecamatan Simalungun, Jurnal multimedia Dehasen, Vol.2, No.2 Tahun 2023
- Nisa Fadilatun, Adllin, Dkk, Perencanaan perbaikan infrastruktur Jalan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Jurnal JAPS, Vol. 4, No.1 Tahun 2023
- Kurnia Akib, peranan pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Melitu Kecamatan Poso pesisir Selatan Kabupaten Poso, Jurnal Ilmiah Administrasi, Vol 8, No 1 Tahun 2017
- Sadikin, Hanan Dan Summani, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda, Jurnal Pengguruang Convergence Series, no,3, vol.3 Tahun 2021
- Santika Ratna, Aji Ratna Kusuma, Dkk, Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Panajam Kabupaten Panajam Pasar Utara, Jurnal Administrasi Negara Vol.7, No.1 Tahun 2019
- Sarah Dewi, Simbolon, Julita Sari, Dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, Jurnal kewarganegaraan, Vol.5, No.2 Tahun 2021

Zahra Karin, Riris Otman, Raito Manalu, Dkk, Anallisis Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Cembung, jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis
Islam, Vol.5, No.3 Tahun 2024